

**PERALIHAN HAK ATAS MILIK KENDARAAN BERMOTOR DIBAWAH
TANGAN DALAM JAMINAN FIDUSIA
(STUDI DI KOTA BATAM)**

NURLAILY

ABSTRACT

Finance Corporate is one of the containers has a trend that is in demand by the public in possession of a motor vehicle today. With the rampant growth of these finance companies, then provide a wide range of selection options for prospective customers to use the services of a Finance Corporate. For example: a comparison of interest rates, flexible terms, and the rapid process of disbursement of funds to finance the vehicle of interest by the potential consumers into a particular reason for consumers in determining believed Financing Company. Vehicles purchased by consumers with the help of funding from finance companies, of course, legally set in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary written stipulates that vehicles purchased in installments, to be charged Fiduciary. But with the passing of culture in society regarding the purchase of a motor vehicle with a loading fiduciary, causes people to have ideas that are more economical and efficiency in the process of transfer of the motor vehicle to the other party (the debtor second), namely by way of a purchase agreement under hand without reporting to the Finance Corporate.

Keywords : Finance Corporate

I. Pendahuluan

Dalam menjalankan proses pinjam meminjam, bank salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa perbankan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan oleh bank baik dengan modal sendiri, atau dengan jalan memperdagangkan alat-alat pembayaran baru.¹

Alat-alat pembayaran baru disini dapat diartikan timbulnya suatu perjanjian utang piutang atau pemberian kredit antara pihak kreditur terhadap debitur, asalkan kedua belah pihak sepakat untuk memberikan dan mengembalikan dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

¹ O. P. Simorangkir, *Kamus Perbankan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 33.

Untuk menjamin atau memastikan kelancaran pengembalian dana atau dapat dikategorikan dana yang diberikan secara kredit maka diperlukan adanya suatu jaminan. Bentuk pengaman kredit dalam praktik perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan.² Dalam melakukan pengikatan jaminan atau melaksanakan perjanjian yang dibuat secara tertulis, terlebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat isi di dalam perjanjian yang akan dituangkan dalam perjanjian, baik itu mengenai kewajiban kedua belah pihak debitur dengan kreditur

Sedangkan perjanjian sebagaimana yang diketahui, bahwa dasar dari suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) syarat untuk sahny suatu perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan dari mereka yang mengikat diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu, dan;
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata telah memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian. Hal ini erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat suatu perjanjian.³ Dari pasal tersebut maka pada perkembangannya timbullah perjanjian-perjanjian dalam masyarakat yang tidak sepenuhnya diatur dalam KUHPerdata. Jenis perjanjian yang dimaksud adalah :

1. Beli Sewa (*huurkoop*).

Beli sewa (*huurkoop*) adalah jenis perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang dalam Pasal 1319 KUHPerdata telah diberikan landasan yuridis mengenai adanya perjanjian tidak bernama. Selain itu perjanjian beli sewa yang merupakan perjanjian *innominaat* ini haruslah tunduk pada ketentuan umum KUHPerdata seperti dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang memberikan

² Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 2.

³ KUHPerdata Pasal 1338 ayat 1, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut.

batasan bahwasannya segala bentuk perjanjian diperbolehkan apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.⁴

2. Jual beli dengan angsuran (*koop op betaling*).

Jual beli dengan angsuran (*koop op betaling*)⁵, hak milik atas barang/objek jual beli telah beralih dari penjual kepada pembeli bersamaan dengan dilakukannya penyerahan barang kepada pembeli, walaupun pembayaran dapat dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah disepakati dan ditentukan.

3. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Leasing adalah salah satu jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁶ Istilah Leasing berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *lease* yang berarti sewa-menyewa, pada dasarnya leasing merupakan suatu bentuk derivatif dari sewa-menyewa yang kemudian berkembang dalam bentuk khusus serta mengalami perubahan fungsi menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia leasing sering diistilahkan dengan sewa guna usaha.⁷

Dalam perkembangannya dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan untuk menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah lembaga usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 meliputi :

⁴ KUHPdata Pasal 1337, perhatikan juga Pasal 1319 KUHPdata yang tertulis membedakan perihal adanya 2 (dua) jenis perjanjian yang dikenal yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang mana hukum kontrak *innominaat* (spesialis) merupakan bagian dari hukum kontrak (generalis) yang antara lainnya juga termasuk didalam nya adalah : perjanjian sewa beli, perjanjian sewa guna (*leasing*), perjanjian anjak piutang (*factoring*) dan modal ventura (*joint venture*).

⁵ bdkg S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda – Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal 23, yang menuliskan penulisan *afbetaling kopen* (membeli dengan angsuran).

⁶ Subagyo, *et.al.*, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Algifari, 2002), hal. 6.

⁷ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 2.

- a. Perusahaan Pembiayaan;
- b. Perusahaan Modal Ventura;
- c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Selanjutnya pada Pasal 3 bahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi:

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit;
- d. Pembiayaan Konsumen.

Hampir seluruh bidang bisnis maupun non bisnis telah dimasuki oleh bisnis pembiayaan, dan dalam tulisan penelitian ini di khusus-kan pembahasan masalah pembiayaan di bidang transportasi atau kendaraan bermotor yang mana pembayaran yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan sistem pembayaran secara angusran.

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) merupakan kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angusran. Yang masih bersifat konvensional. Dikatakan konvensional karena ternyata sewa menyewa itu merupakan bangunan tua dan sudah lama sekali ada dalam sejarah peradaban umat manusia. Pranata hukum sewa menyewa yang dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan telah terekam dalam sejarah, kurang lebih 4500 tahun sebelum masehi. Yakni sewa menyewa yang dipraktekkan dan dikembangkan oleh orang-orang Sumeri.⁸

Di dunia usaha atau perusahaan, hubungan hukum tidak akan pernah terhindari, artinya suatu hubungan subyek hukum yang diakibatkan dari suatu hubungan diatur oleh suatu ketentuan hukum yang berlaku. Di bidang dunia usaha, juga termasuk di dunia perbankan khususnya di bidang pendanaan, hubungan hukum tersebut pada umumnya terjadi karena perjanjian, sedangkan pihak yang lain memiliki kewajiban, secara tidak langsung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut yang mana perjanjian yang disepakati adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang

⁸ Sri Suyatmi dan Sudiarto J., *Problematika Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1992), hal. 11.

wajib dipatuhi dan di taati oleh para pihak. Sebagai contoh kasus pendanaan mobil atau fasilitas kredit kendaraan bermotor, setiap unit kendaraan yang memperoleh persetujuan kredit secara tidak langsung mengandung makna bahwa terjadinya penyerahan hak milik dengan azas kepercayaan antara perusahaan pendana dengan debitur.

Perlu diketahui bahwa asal mula dari istilah kredit tidak berasal dari bahasa Belanda atau Indonesia, namun istilah kredit pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *credere*, yang artinya adalah percaya atau kepercayaan.⁹ Kepercayaan ini ditunjukkan oleh sikap si pemberi kredit (kreditur) yang yakin bahwa si penerima kredit (debitur) sanggup dan mampu untuk melunasi atau mengembalikan hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 mengartikan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Disini terlihat adanya suatu kontra prestasi yang akan diterima oleh kreditur dan adanya tenggang waktu yang memisahkan antara prestasi dengan kontra prestasi. Namun adanya tenggang waktu ini pada kenyataannya justru dapat mengakibatkan adanya risiko. Semakin lama tenggang waktunya semakin tinggi pula tingkat risikonya, oleh karena itu dalam pemberian kredit hanya sekedar memerlukan kepercayaan saja.

Kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia masih merupakan suatu problem hukum yang harus diberikan kejelasannya. Pengertian kepemilikan benda dalam hukum jaminan memiliki makna yang luas yakni mencakup hak milik atas benda dan hak penguasaan atas benda. Jika seorang debitur menyerahkan harta benda sebagai jaminan kepada krediturnya berarti sebagian kekuasaan atas kepemilikan benda itu beralih kepada kreditur¹⁰.

Perkataan fidusia mempunyai arti “secara kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal-balik oleh satu pihak kepada yang

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 23.

¹⁰ Tan Kamello, *Op.cit.*, hal. 190.

lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (kedalam, *intern*) hanya suatu jaminan saja untuk hutang.¹¹

Hubungan jaminan fidusia yang tercipta karena kontrak (*fiduciary relationships created by contract*) terjadi apabila unsur kepercayaan, yang diperlukan untuk mencapai tujuan kontrak itu ada atau hadir.¹² Yang termasuk didalamnya adalah :

1. *Formal Fiduciary Relationships Created by Contract* (Hubungan formal fidusia yang tercipta karena kontrak). Suatu hubungan fidusia yang formal boleh terjadi karena kontrak.¹³
2. *Informal Fiduciary Relationships Created by Contract* (Hubungan informal fidusia yang tercipta karena kontrak). Suatu hubungan informal muncul dimana seorang mempercayai dan meletakkan kepercayaan terhadap yang lainnya, apakah hubungan itu merupakan hubungan moral, sosial, rumah tangga atau hanya pribadi.¹⁴

Salah satu sarjana yang sejak semula berpendapat, bahwa fidusia dapat diterapkan baik untuk jaminan barang-barang tetap adalah Pitlo¹⁵ dan selanjutnya adalah Tan Kamello. Untuk barang objek jaminan hutang yang masih tergolong benda bergerak, tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya, oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.¹⁶

¹¹ Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 76, bandingkan (selanjutnya ditulis dengan “bdgk”) dengan <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34206/3/Chapter%20II.pdf>, yang dikunjungi terakhir pada 15 Mei 2015, 11:00 Wib yang menjelaskan bahwa istilah Fidusia dalam bahasa Indonesia juga memiliki istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan” yang dalam terminologi Belanda sering disebut dengan istilah *Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO)*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.

¹² John F. Nichols SR, *Fiduciary Litigation-Defining Relationships*, (Houston Texas: State Bar of Texas, 2006, chapter-1, hal 4. Perhatikan juga Tan Kamello, *Op.cit.*, hal. 35. yang menjelaskan bahwa fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem *civil law*.

¹³ *Ibid.*, hal. 4.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁵ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Jaminan di Indonesia*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 254.

¹⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 2.

Pakar hukum dari Belanda, O.K Brahn mengatakan bahwa “pembagian hak milik antara hak milik secara yuridis berada di tangan kreditur dan hak milik secara ekonomi tetap berada di tangan debitur, lazimnya orang menyebut istilah milik fidusia”¹⁷.

Penelitian ini akan menggambarkan bahwa pihak debitur pertama (debitur lama) mengalihkan hak atas barang bergerak kendaraan bermotor tersebut kepada debitur kedua (debitur baru) yang angsurannya masih sedang berjalan atau kredit belum lunas antara kreditur dengan debitur pertama yang lazim disebut pengalihan angsuran (*over credit*). Debitur pertama tidak memberitahukan kepada kreditur bahwa kendaraan tersebut sudah dialihkan kepada debitur kedua. Pengalihan hak dari debitur pertama kepada debitur kedua menimbulkan masalah hukum karena debitur kedua menerima peralihan hak atas kendaraan tersebut tanpa alas hak (*rechtstitel*) yang sah. Hal ini merupakan pelanggaran atas perjanjian yang dilakukan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen (debitur pertama).

Dalam praktik perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dikatakan bahwa debitur pertama adalah pemilik benda jaminan, dimana bukti kepemilikan benda kendaraan bermotornya atas nama debitur pertama diserahkan kreditur sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal perjanjian. Dalam praktik ditemukan kalusul bahwa barang jaminan dipindahtangankan atau dijaminakan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari kreditur dikatakan debitur melakukan wanprestasi.¹⁸ Pemahaman milik dalam masyarakat bisnis dapat diartikan dalam dua hal yakni:

1. Debitur menguasai titel dari benda jaminan dan sekaligus menguasai benda secara fisik.
2. Debitur menguasai benda jaminan secara fisik sedangkan secara yuridis debitur belum menjadi pemilik.¹⁹

¹⁷ Tesis, Yosephina Hotma Vera : *Agunan Dalam Perjanjian Kredit Yang Di Ikat Dengan Akta Jaminan Fidusia Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Otorita Batam*, 2009, yang di kutip dari Mahadi, *Hak Milik dalam Hukum Perdata Nasional*, (Jakarta: Proyek BPHN), hal. 1.

¹⁸ Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fdusia Angka 12 Huruf (f) pada perjanjian di PT. Astra Sedaya Finance Kota Batam.

¹⁹ Tan Kamello, *Op.cit.*, hal. 335.

Dikaitkan dengan hukum jaminan, bilakah saat debitur itu dianggap sebagai pemilik benda jaminan, bilakah saat debitur itu dianggap sebagai pemilik benda jaminan secara fisik menjaminkan benda itu kepada bank untuk meminjam kredit. Permasalahan ini semakin jelas dalam kenyataan perilaku bisnis jual beli kredit kendaraan bermotor.²⁰ Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peralihan hak atas kepemilikan kendaraan bermotor dibawah tangan dalam jaminan fidusia.

Perumusan Masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia berkaitan dengan perjanjian pembiayaan dalam perspektif KUHPerdara ?
2. Bagaimanakah keabsahan penyerahan kendaraan bermotor dalam jaminan fidusia yang telah terikat dalam perjanjian pembiayaan dari debitur pertama kepada debitur kedua ?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur kedua yang telah melunasi angsuran kendaraan bermotor terhadap kepastian hak milik atas kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia berkaitan dengan perjanjian pembiayaan dengan debitur pertama dalam perspektif KUHPerdara.
2. Untuk mengetahui keabsahan penyerahan kendaraan bermotor dalam jaminan fidusia yang telah terikat dalam perjanjian pembiayaan dari debitur pertama kepada debitur kedua.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur kedua yang telah melunasi angsuran kendaraan bermotor terhadap kepastian hak milik atas kendaraan bermotor.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif eksplanatif, dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

²⁰ *Ibid.*

- a. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan-bahan yang mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan pustaka yang meliputi buku-buku hasil karya para sarjana, hasil penelitian dan penemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan kamus lainnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan: wawancara terarah yaitu menggunakan pedoman wawancara terarah dengan sumber informasi (*informan*) Wawancara terarah sebagaimana yang dimaksud adalah dengan melakukan tanya jawab kepada petugas yang berwenang pada PT. Astra Credit Company (bernama Ria) yang mewakili bagian Legal Officer, Marketing dan ataupun Branch Manager yang memiliki pemahaman dan kecukupan informasi perihal pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Benda dalam pengertian hukum tidak identik dengan benda dalam pengertian ilmu eksakta (ilmu alam). Dalam ilmu eksakta dikenal benda padat, benda cair dan benda gas. Secara yuridis benda diartikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 499 KUHPdata, yang berbunyi : “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Berdasarkan Pasal 503, Pasal 504, dan Pasal 505 KUHPdata, ditentukan tentang cara-cara membedakan kebendaan.

Pasal 503 KUHPdata berbunyi: tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh. Pasal 504 KUHPdata berbunyi : tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut. Pasal 505 KUHPdata berbunyi :tiap-tiap kebendaan adalah dapat

dihabiskan atau tak dapat dihabiskan : kebendaan dikatakan dapat dihabiskan, bilamana karena dipakai, menjadi habis.

Benda bergerak atau benda tidak bergerak dapat berupa benda yang sudah ada maupun benda yang baru akan ada di kemudian hari, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Barang yang akan ada ini di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1334 KUHPerdara. Deskripsi KUHPerdara tersebut mengenai jenis kebendaan dapat disimpulkan bahwa benda dapat dibagi dalam beberapa hal: pertama, benda bergerak dan benda tidak bergerak; kedua, benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh); ketiga, benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan; keempat benda yang sudah ada dan benda yang akan ada; kelima, benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan.

Berdasarkan pasal-pasal di atas dikatakan bahwa kendaraan bermotor adalah termasuk dalam benda bergerak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 509 KUHPerdara yang berbunyi: kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan.

Pentingnya benda bergerak karena sifatnya ini adalah untuk kedudukan berkuasa (*bezit*), untuk penjaminan (*bezwaring*), untuk penyerahan (*levering*), untuk daluwarsa (*verjaring*), dan penyitaan (*beslag*).²¹ Berikut ini dijelaskan hal-hal yang dimaksud tersebut. Mengenai *bezit*, ditentukan dalam Pasal 1977 KUHPerdara ayat (1) yang mengatakan barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Jadi *bezitter* dari benda bergerak adalah *eigenaar* dari benda tersebut. Tidak demikian halnya terhadap penguasaan benda tidak bergerak. Mengenai penjaminan, ditentukan terhadap benda bergerak dilakukan dengan gadai (*pand*) dalam Pasal 1150 KUHPerdara atau jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, sedangkan terhadap benda tidak bergerak dilakukan dengan hak tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 dan kalau kapal berukuran lebih dari 20 meter kubik merupakan benda tidak bergerak dilakukan dengan jaminan hipotik dalam Pasal 1162 KUHPerdara. Menenai penyerahan (*levering*), ditentukan dalam Pasal 612

²¹ Sri Soedewi Masjuchun Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 119.

KUHPerdata yang berbunyi bahwa penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada, sedangkan penyerahan benda tak bergerak menurut Pasal 616 KUHPerdata harus dilakukan dengan balik nama pada daftar umum. Kalau tanah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Mengenai daluwarsa, terhadap benda bergerak tidak dikenal daluwarsa sebab bezit disini sama dengan eigendom atas benda bergerak itu, sedangkan benda-benda tak bergerak mengenal daluwarsa. Mengenai penyitaan, *revindicatoir beslag* yaitu penyitaan untuk menuntut kembali barangnya sendiri hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang bergerak. Kemudian *executoir beslag* yaitu penyitaan untuk melaksanakan keputusan pengadilan harus dilakukan terlebih dahulu terhadap barang-barang bergerak. Apabila tidak mencukupi untuk membayar hutang tergugat kepada penggugat, baru *executoir beslag* tersebut dilakukan terhadap barang-barang tak bergerak.

Sebelum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diterbitkan, jaminan fidusia dikenal dengan istilah *Fiduciaire Eigendoms Overdraht* (FEO) yang diatur dalam yurisprudensi. Di Indonesia pengakuan lembaga fidusia pertama ditemukan pada putusan Hooggerechtschof (Hgh) dalam perkara *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) Vs Pedro Clognett* tanggal 18 Agustus 1932.²² Dalam hukum positif pertama kali mendapat pengakuan secara parsial melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Pemukiman dan Perumahan. Selanjutnya secara unifikasi dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini, dibedakan antara pengertian fidusia dengan pengertian jaminan fidusia sebagai berikut :

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang

²² Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2014), hal. 58-96.

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa objek jaminan fidusia adalah :

1. benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud;
2. benda tidak bergerak yaitu bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Khusus objek jaminan fidusia berupa benda bergerak, si debitur menyerahkan benda tersebut kepada kreditur tetapi penguasaan benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada pada debitur. Penyerahannya dilakukan secara *constitutum possessorium*, artinya penyerahan benda tidak diserahkan kepada kreditur melainkan tetap dikuasai oleh debiturnya.

Jaminan fidusia secara khusus, tidak tertulis dalam KUHPerdara tetapi secara analogi dari gadai dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia memiliki hak preferent. Setelah lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, semakin jelas dan secara eksplisit dinyatakan bahwa kreditur penerima fidusia mempunyai hak preferent. Tidak ditegaskan lebih lanjut apakah hak preferensi kreditur tersebut lebih tinggi kedudukannya dari pada hak diistimewakan (*privelege*) atau sebaliknya.

Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan rumusan sekaligus menjelaskan perbedaan antara pengertian fidusia dengan Jaminan Fidusia sebagai berikut :

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Undang Undang Hak Tanggungan) yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dalam jual beli senantiasa terdapat terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan jual beli melahirkan hak atas tagihan berupa penyerahan kebendaan di satu pihak, dan pembayaran harga pada pihak lainnya, sedangkan pada sisi perikatan, jual beli merupakan bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.²³

Pada Astra Credit Companies (ACC) di Kota Batam, pihak ACC dan Kreditur mengikat diri dengan menuangkan kesepakatan “Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia” yang mencantumkan syarat-syarat baku yang sudah ditentukan oleh ACC selaku kreditur. Pada perjanjian tersebut kreditur mengguraikan deskripsi kendaraan, serta status kendaraan (apakah baru atau bekas) dengan tanpa mengabaikan turut juga mencantumkan perhitungan hutang pokok debitur termasuk angsuran bulanan yang menjadi kewajiban debitur yang juga dituangkan didalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut juga turut diketahui dan ditandatangani oleh pihak *showroom* selaku penyedia unit kendaraan dan diketahui untuk menyetujui oleh istri/suami debitur. Selanjutnya setelah perjanjian tersebut ditandatangani, maka akan dibuatlah Berita Acara Serah Terima atas unit kendaraan yang mana penyerahan dilakukan oleh pihak *showroom dealer* kepada debitur. Untuk menjamin seluruh pembayaran menjadi kewajiban debitur kepada kreditur, maka debitur setuju untuk menjaminkan objek kendaraan bermotor tersebut secara fidusia dan ketentuan mengenai penjaminan fidusia tersebut dicantumkan pada Pasal 14 “Penjelasan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia”.²⁴

²³ Gunawan Widjaya dan Kartini Mulyadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 7.

²⁴ Penjelasan mengenai debitur menjaminkan objek kendaraannya secara fidusia ini sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam “Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia” (Terlampir : “Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia... Lampiran I)

Dalam hal membuktikan hak atas benda bergerak yaitu dengan membuktikan dokumen-dokumen yang melekat yang menyertai kendaraan/benda bergerak tersebut. Sebagai contoh : terhadap kendaraan bermotor, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor atau yang lazim disebut dengan sebutan BPKB, terhadap bukti ini memiliki banyak kelemahan, antara lain kelemahan yang dimaksud adalah, bahwa faktanya Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor hanya merupakan dokumen identitas kendaraan dan bukan dokumen kepemilikan kendaraan, sehingga sering ditemukan bahwa nama yang tercantum di Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor bukanlah pemilik dari kendaraan tersebut. Terhadap benda bergerak lainnya, juga dapat dijadikan bukti adalah faktur pembelian, namun akan tetapi dokumen faktur pembelian ini hanya sebagai salah satu dokumen pendukung saja. Terhadap pembentukan perjanjian jaminan fidusia, dasar kepemilikan benda bergerak lazimnya menggunakan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor dan kwitansi (faktur) pembelian atau juga didasari oleh jenis perjanjian yang melekat pada objek benda bergerak tersebut, misalkan menyangkut adanya perjanjian pembiayaan terhadap objek ataupun beli sewa dengan angsuran.

Tan Kamello menjelaskan bahwa dalam praktek kehidupan sehari-hari, permasalahan yang sering terjadi adalah perihal mengenai status kepemilikan atas benda jaminan fidusia yang masih dipertanyakan status kepemilikannya, apakah milik kreditur penerima fidusia atau debitur pemberi fidusia.²⁵ Hak kepemilikan benda yang dijadikan agunan dalam konsep jaminan fidusia telah dialihkan dari debitur kepada kreditur penerima fidusia yang berarti hak dari benda tersebut diserahkan kepada kreditur namun akan tetapi kekuasaan atas benda tersebut secara fisik berada pada penguasaan debitur. Sehingga kreditur penerima fidusia adalah selaku pemilik hak, bukan sebagai pemegang hak jaminan.

Selaku pemilik hak harus diartikan sebagai pemilik jaminan atas benda, bukan pemilik benda sepenuhnya dalam pengertian jual beli. Kreditur sebagai pemilik hak, menguasai bukti kepemilikan atas objek kendaraan bermotor (BPKB dan bukti kwitansi pendukung lainnya).²⁶

²⁵ Tan Kamello, *Op.cit.*, hal. 258. Disini Tan Kamello menyampaikan bahwa ditemukannya yurisprudensi dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Kota Medan dalam perkara Bank Bumi Daya melawan Kantor Pelayanan Pajak Medan barat dan PT. Mahogoni Indah Industri dengan nomor registrasi perkara No. 40/Pdt.Plw/1994 tertanggal 17 November 1994.

²⁶ *Ibid.*

Dengan demikian, status hak kebendaan atas objek kendaraan bermotor yang dibebankan dengan jaminan fidusia hak atas benda sepenuhnya dimiliki oleh kreditur, sedangkan debitur selaku pemberi fidusia memiliki hak untuk menikmati objek jaminan yang dibebankan jaminan fidusia.

Transaksi jual beli sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUHPerdara, ditegaskan dalam Pasal 1459 yang secara tersirat menjelaskan bahwa sepanjang penyerahannya tidak berpindah kepada si pembeli sebelum sesuai dengan ketentuan Pasal 612, 613 dan Pasal 616 KUHPerdara maka pengalihan hak atas benda tersebut belum berpindah.

Khusus perpindahan barang bergerak, pada Pasal 612 KUHPerdara menyatakan bahwa penyerahan kebendaan bergerak dilakukan dengan menyerahkan yang nyata akan kebendaan tersebut oleh atau atas nama pemilik. Beralihnya hak kepemilikan atas kendaraan bermotor berdasarkan pasal tersebut memiliki dua cara, yaitu penyerahan dengan tangan pendek dan penyerahan dengan simbolis.²⁷

Hak milik atas kendaraan bermotor belum terjadi peralihan dari *lessee* sebelum hak opsi beli dilaksanakan oleh pembeli, tetapi karena *lessor* memang bertujuan sebagai penyanggah dana, maka selaku perusahaan pembiayaan bukan sebagai pemilik, maka sudah selayaknya jika beban resiko dari suatu pembiayaan yang dalam keadaan *force majeure* dibebankan kepada *lessee*.

Dalam perjalanan perjanjian jaminan fidusia antara debitur dan kreditur sangat memungkinkan terjadinya perpindahan kredit dari kreditur satu ke kreditur yang lainnya. Hal ini dapat terjadi dengan alasan debitur sebagai peminjam dana ingin mencari bunga lebih rendah pada kreditur yang lain, untuk itulah pengalihan jaminan fidusia ini dapat terjadi.

Perbuatan mengalihkan barang jaminan kepada pihak ketiga tidak boleh dilakukan oleh seorang debitur dengan jalan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Apabila hal tersebut terjadi, maka seluruh utang debitur kepada kreditur dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh kreditur kepada debitur. Tindakan debitur tersebut dapat dikatakan penggelapan sebagaimana yang diatur

²⁷ <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1711/1353>, dikunjungi terakhir 12 November 2015, pada pukul 15:00 Wib.

dalam Pasal 372 KUHPidana dengan ancaman penjara selama-lamanya 4 tahun.²⁸ Berbeda dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan objek yang menjadi jamin kepada pihak lain kecuali dengan adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia.²⁹ Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).³⁰

Pengalihan jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang isinya “pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru”. Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam praktik di Kota Batam, peralihan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debitur lama kepada debitur baru dilakukan dengan penyerahan nyata barang kendaraan bermotor tersebut dari tangan ke tangan pada saat penandatanganan perjanjian di bawah tangan. Momentum tersebut membuktikan bahwa debitur baru sudah menjadi pemilik atas fisik kendaraan bermotor. Namun secara yuridis, karena BPKB masih berada dalam penguasaan kreditor, pemilik kendaraan tersebut secara yuridis adalah orang yang namanya tercantum dalam BPKB (debitur pertama). Debitur baru akan menjadi pemilik kendaraan secara yuridis apabila telah terjadi pembalikan nama pada BPKB yang di proses pada Kantor SAMSAT Kota Batam.

Berdasarkan teori perlindungan yang dikemukakan di atas bahwa teori preventif dalam peralihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia kepada pihak lain melalui perjanjian di bawah tangan, pihak perusahaan belum mengatur secara detail tentang cara peralihan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Peralihan hanya dibenarkan secara sumir dalam arti pihak debitur pertama hanya dapat mengalihkan apabila terdapat izin dari pihak perusahaan pembiayaan terlebih dahulu.

²⁸ Perhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid)

²⁹ Perhatikan Pasal 23 ayat 2 UUJF.

³⁰ Perhatikan Pasal 36 UUJF.

Perlindungan hukum represif bahwa peralihan objek jaminan fidusia melalui perjanjian di bawah tangan belum diatur di dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia sehingga apabila terjadi wanprestasi debitur pertama maka seharusnya pihak perusahaan dapat menggunakan hak preferensi yang diberikan oleh UUJF untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. Namun oleh karena debitur pertama telah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada debitur kedua sehingga sulit bagi perusahaan untuk mengontrol adanya wanprestasi dari debitur pertama. Oleh karena itu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan terhadap kelalaian debitur pertama tidak dapat dituntut melalui proses hukum formal (hukum acara perdata) atau non-litigasi (arbitrase).

Tabel 3
Data Unit Kendaraan Yang Ditarik
PT. Astra Credit Company (ACC)
Batam³¹

Nama Perusahaan	Tahun 2013 - 2014		
	Dijual	Ditarik	Dilelang
PT. Astra Sedaya Finance	132.043 unit	2640 unit	45 unit
PT. Astra Auto Finance	26.427 unit	528 unit	28 unit
PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance	105.919 unit	2.118 unit	75 unit

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Astra Credit Companies (ACC) 2015. Di Kota Batam, kendaraan yang terjual melalui pelelangan dari teori perlindungan bahwa, debitur kedua yang telah menerima peralihan hak dari debitur pertama dan memiliki itikad baik dengan melakukan pembayaran angsuran kepada perusahaan pembiayaan tidak diberitahukan oleh debitur pertama akibat dari pembayaran tersebut. Seharusnya pihak debitur pertama memberitahukan lebih awal kepada debitur kedua segala resiko yang akan terjadi apabila angsuran sudah dilunasi oleh debitur kedua. Oleh karena itu dapat dilakukan upaya bahwa pihak perusahaan pembiayaan memberikan pernyataan kepada debitur kedua jika di kemudian hari ada terdapat tuntutan dari pihak pertama mengenai hak atas BPKB dari kendaraan bermotor tersebut.

Perlindungan hukum represif bahwa pihak penerima peralihan hak dari debitur pertama kepada debitur kedua menimbulkan hak bagi debitur kedua yang

³¹ Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ferdi, dari interval tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 terdapat rata-rata jumlah kendaraan yang ditarik dan dilelang sebesar 2 persen.

memiliki itikad baik untuk menuntut hak atas BPKB baik melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Perlindungan hukum ini didasarkan kepada asas itikad baik yang ada pada debitur kedua. Kepada perusahaan pembiayaan merupakan kewajiban hukum untuk menyerahkan hak atas BPKB kepada orang yang telah melunasi pembayaran dengan resiko bahwa akan dapat dituntut oleh pihak yang telah melunasi untuk menyerahkan BPKB tersebut dalam proses penuntut hak melalui proses litigasi dan non-litigasi.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Astra Credit Companies (ACC) di Kota Batam yang terdiri dari 3 perusahaan yang antara lain adalah PT. Astra Sedaya Finance, PT. Astra Auto Finance dan PT. Bhakti Sedaya Finance yang melayani konsumen dalam bentuk jasa pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor dan fokus tujuan penelitian ini hanya terfokus pada PT. Astra Credit Companies (ACC) di Kota Batam sebagaimana maksud dan tujuan dari judul penelitian ini.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia berkaitan dengan perjanjian pembiayaan dalam perspektif KUHPdata adalah sebagai berikut : bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance contract*) merupakan perjanjian tidak bernama yang didasarkan pada Pasal 1319 KUHPdata dengan tetap mengikuti asas kebebasan berkontrak menurut KUHPdata. Kendaraan bermotor merupakan benda bergerak yang dapat dijaminakan melalui jaminan fidusia. Jaminan fidusia yang dilakukan perusahaan pembiayaan harus mengikuti tahapan terjadinya jaminan fidusia sebagaimana yang ditentukan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu tahapan pembuatan perjanjian obligatoir, Tahap Kedua, Akta Pembebanan Fidusia dan tahap ketiga tahap pendaftaran Jaminan Fidusia. Tahap pendaftaran jaminan fidusia memberikan secara pedata kepada perusahaan pembiayaan menjadi kedudukan kreditur preferensi.
2. Keabsahan penyerahan kendaraan bermotor dalam jaminan fidusia yang telah terikat dalam perjanjian pembiayaan dari debitur pertama kepada debitur kedua. Sebagian memuat larangan dalam pengalihan dari debitur pertama kepada debitur kedua, kecuali dengan adanya izin dari kreditur dan sebagian

lagi tidak memuat adanya larangan pengalihan kendaraan dari debitur pertama kepada pihak lain. Kenyataan yang tidak ada larangan pihak debitur pertama melakukan pengalihan kepada debitur kedua dengan cara over kredit. Namun akan tetapi, perlu diketahui bahwa objek jaminan tidak diperkenankan di mata hukum untuk diperjual belikan dengan alasan apapun juga. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan kebutuhan masyarakat di kehidupan, terdapat pergeseran kebudayaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu objek yang dijaminakan melalui over kredit dengan catatan diketahui oleh pihak perusahaan pembiayaan (dalam hal ini kreditur).

3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur kedua yang telah melunasi angsuran kendaraan bermotor terhadap kepastian hak milik atas kendaraan bermotor bahwa debitur kedua adalah pihak yang beritikad baik untuk membeli kendaraan bermotor dengan cara melunasi sisa angsuran pembiayaan kepada perusahaan melalui perjanjian di bawah tangan. Pada dasarnya hukum perdata memberikan perlindungan kepada mereka yang beritikad baik sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal 531 KUHPdata dan Pasal 533 KUHPdata. Perlindungan hukum terhadap akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1875 KUHPdata.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Perusahaan Pembiayaan melakukan sosialisasi atas peraturan pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran konsumen untuk mematuhi Undang-Undang 42 Tahun 1999 dan PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan Fidusia.
2. Diharapkan kepada konsumen kendaraan bermotor yang diperoleh melalui Perusahaan Pembiayaan tidak boleh melakukan take over, karena dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari yang dapat menghabiskan waktu dan biaya untuk menyelesaikannya.
3. Diharapkan agar kekuatan hukum pembuktian bagi perjanjian di bawah tangan dilakukan legalisasi di notaris sehingga dapat menghindari penipuan di belakang hari.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni, 1980.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Kamello, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni, 2006.
- . *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumni, 2014.
- Simorangkir, O. P. *Kamus Perbankan*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- . *Jaminan di Indonesia*, cetakan pertama. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- SR, John F. Nichols. *Fiduciary Litigation-Defining Relationships*. Houston-Texas: State Bar of Texas, 2006.
- Subagyo *et.al.* *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Algifari, 2002.
- Subekti. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Suyatmi, Sri. dan J. Sudiarto. *Problematika Leasing di Indonesia*. Jakarta: Arikha Media Cipta, 1992.
- Widjaya, Gunawan dan Mulyadi, Kartini. *Jual Beli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wojowasito, bdk S. *Kamus Umum Belanda - Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

C. Internet

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1711/1353>, diakses 12 November 2015, pada pukul 15:00 Wib.